



Analisis Penggunaan Bahasa Indoneisa yang Baik dan Benar dalam Teks Pidato Bupati Tasikmalaya pada HUT Kabupaten ke-387

Berliana Syifaul Ummah¹, Diaz Fathul Muiz², Nazwa Fadillah Ahla³,
Zahra Meyla Nurfadillah⁴, Yuni Ertinawati⁵

^{1,2,3,4}Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Indonesia, ⁵Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
E-mail : Sberliana1412@gmail.com, diazfathulmuiz@gmail.com, najwafadillahahla@gmail.com,
zahrameylanf@gmail.com, yuniertinawati@unsil.ac.id

Article Info

Article history:

Received October 05, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 22, 2025

Keywords:

Indonesian Language, Speech,
Linguistic Analysis, PUEBI.

ABSTRACT

This study aims to analyze the proper and correct use of Indonesian language in the speech delivered by the Regent of Tasikmalaya at the 387th anniversary of Tasikmalaya Regency. The analysis was conducted using a qualitative descriptive approach by examining the suitability of the speech to linguistic rules based on the General Guidelines for Indonesian Spelling (PUEBI), linguistic theory, and formal language norms. The results of the study show that, in general, the Regent's speech reflected the proper use of Indonesian (in accordance with social and cultural norms) and correct usage (in accordance with linguistic rules). However, several errors were found, such as excessive use of capital letters, non-standard abbreviations, inappropriate foreign vocabulary, overly long sentences, and the insertion of regional terms without explanation. Improvements to these aspects are needed so that official speeches are more communicative, effective, and in accordance with linguistic rules.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 05, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 22, 2025

Keywords:

Bahasa Indonesia, Pidato,
Analisis Kebahasaan, PUEBI.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam teks pidato Bupati Tasikmalaya pada peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tasikmalaya ke-387. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menelaah kesesuaian pidato terhadap kaidah kebahasaan berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), teori linguistik, dan norma bahasa formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pidato Bupati telah mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik (sesuai norma sosial dan budaya) dan benar (sesuai kaidah kebahasaan). Namun ditemukan beberapa kesalahan, seperti penggunaan huruf kapital berlebihan, singkatan tidak baku, kosakata asing yang tidak tepat, kalimat yang terlalu panjang, serta penyisipan istilah daerah tanpa penjelasan. Perbaikan terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan agar pidato resmi lebih komunikatif, efektif, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Berliana Syifaul Ummah
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
E-mail: Sberliana1412@gmail.com

Pendahuluan

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki peran sentral dalam komunikasi formal, termasuk dalam kegiatan pemerintahan. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi yang digunakan oleh pejabat publik untuk menyampaikan informasi, visi, dan ajakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi syarat penting agar pesan tersampaikan dengan jelas dan efektif. Pidato Bupati Tasikmalaya pada peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tasikmalaya ke-387 menjadi momen penting yang merepresentasikan citra pemerintah daerah. Namun, masih sering dijumpai kesalahan dalam penggunaan bahasa pada pidato resmi, baik dari segi ejaan, struktur kalimat, maupun pilihan kata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana teks pidato tersebut mematuhi kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas komunikasi publik.

Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Nugroho (2018), Dewi dan Santosa (2020), serta Suroso (2021) menunjukkan bahwa analisis kaidah kebahasaan penting dalam menilai efektivitas teks formal. Penelitian ini memperluas fokus kajian pada konteks pidato pejabat pemerintahan daerah dengan tujuan: (1) mengetahui penggunaan bahasa Indonesia dalam teks pidato Bupati Tasikmalaya, (2) menganalisis kesalahan kebahasaan yang ditemukan, dan (3) memberikan rekomendasi perbaikan agar sesuai dengan kaidah PUEBI dan konteks sosial budaya.

Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi, pidato juga mencerminkan kemampuan berbahasa seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan secara efektif. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks pemerintahan daerah bukan hanya persoalan linguistik, tetapi juga mencerminkan profesionalitas dan kredibilitas pejabat publik. Menurut Sarah dan Hindun (2021), penggunaan bahasa baku dalam komunikasi formal berperan penting dalam membangun persepsi masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dengan demikian, analisis terhadap teks pidato Bupati Tasikmalaya menjadi relevan karena dapat menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah menerapkan kaidah kebahasaan dalam kegiatan seremonial yang bersifat publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian kebahasaan serta manfaat praktis bagi peningkatan kualitas komunikasi pemerintahan di masa mendatang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar diterapkan dalam teks pidato Bupati Tasikmalaya pada peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tasikmalaya ke-387. Melalui analisis terhadap naskah pidato tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi serta menganalisis berbagai bentuk kesalahan kebahasaan yang muncul berdasarkan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan teori kebahasaan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi yang konstruktif agar penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi dapat menjadi lebih efektif, komunikatif, serta mencerminkan norma kebahasaan yang baik dan benar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap fenomena bahasa, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas komunikasi resmi pemerintah daerah.



Adapun kegunaan penelitian ini mencakup tiga aspek penting, yaitu teoretis, praktis, dan edukatif. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ilmiah di bidang kebahasaan, khususnya terkait penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks pemerintahan dan komunikasi formal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pejabat publik, penulis naskah pidato, serta mahasiswa dalam menyusun dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan berkesan positif di hadapan masyarakat. Sementara itu, secara edukatif, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kemurnian, ketepatan, dan keindahan bahasa Indonesia, terutama dalam ranah formal seperti kegiatan pemerintahan, pendidikan, maupun acara kenegaraan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis fenomena kebahasaan yang terdapat dalam teks pidato Bupati Tasikmalaya pada peringatan HUT Kabupaten Tasikmalaya ke-387. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia secara kontekstual dan interpretatif tanpa melibatkan perhitungan statistik. Objek penelitian berupa teks pidato resmi Bupati Tasikmalaya, yang dianggap mewakili bentuk komunikasi formal dalam ranah pemerintahan daerah. Data utama diperoleh melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelaah naskah pidato yang bersumber dari arsip resmi pemerintah daerah, laman publikasi media, atau dokumen tertulis yang telah disahkan oleh pihak berwenang.

Proses analisis dilakukan berdasarkan teori kebahasaan yang dikemukakan oleh Chaer (2012) mengenai tata bahasa dan struktur kalimat, Rahman dan Ibda (2017) tentang penggunaan bahasa Indonesia yang efektif dan komunikatif, serta acuan normatif Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI, 2016) sebagai standar baku penulisan. Langkah-langkah analisis meliputi: (1) membaca dan memahami secara menyeluruh teks pidato untuk menangkap konteks, isi, dan tujuan komunikatifnya; (2) mengidentifikasi aspek kebahasaan meliputi ejaan, diksi, struktur kalimat, dan penggunaan istilah; (3) mencatat serta mengklasifikasikan bentuk-bentuk kesalahan atau penyimpangan dari kaidah PUEBI; dan (4) menyusun rekomendasi perbaikan agar bahasa yang digunakan dalam pidato lebih efektif, komunikatif, dan mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan metode ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kebahasaan dalam pidato pejabat publik serta menawarkan masukan yang bermanfaat bagi peningkatan mutu komunikasi resmi di lingkungan pemerintahan.

Hasil dan Pembahasan

1. Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Pidato Bupati Tasikmalaya menunjukkan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai aspek. Bahasa yang digunakan mencerminkan kesantunan, nilai budaya lokal, serta struktur kalimat yang mengikuti kaidah kebahasaan. Sebagai contoh, penggunaan sapaan resmi kepada tamu undangan dan penyisipan nilai religius seperti 'Bismillahirrahmanirrahim' menunjukkan perhatian terhadap norma sosial dan religius masyarakat Tasikmalaya.



2. Kesalahan Kaidah Kebahasaan

Meskipun secara umum baik, masih ditemukan beberapa kesalahan dalam pidato tersebut, antara lain:

1. Penggunaan huruf kapital berlebihan di seluruh teks.
2. Penulisan singkatan tidak baku seperti 'YTH.' dan 'YKH.'.
3. Penggunaan kata asing yang tidak tepat, seperti 'fisikly'.
4. Kalimat yang terlalu panjang sehingga kurang efektif.
5. Penyisipan istilah daerah seperti 'Salasa Nyunda' tanpa penjelasan.

Sebagai contoh konkret, pada kalimat pidato 'Namun, tampaknya kita harus belajar jujur mengakui, bahwa kepribadian kita... mungkin tidak lebih hebat dari kepribadian leluhur kita di zaman dulu', struktur kalimat terlalu panjang dan dapat dipecah menjadi dua kalimat agar lebih efektif.

3. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan temuan di atas, beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah:

1. Menggunakan huruf kapital hanya pada bagian yang sesuai PUEBI.
2. Menulis singkatan secara lengkap agar tidak menimbulkan ambiguitas.
3. Mengganti kosakata asing dengan padanan Indonesia.
4. Menyusun kalimat agar lebih ringkas dan jelas.
5. Memberikan terjemahan atau penjelasan istilah lokal agar lebih mudah dipahami audiens.

Selain rekomendasi di atas, hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara kesalahan kebahasaan dengan kurangnya pemahaman teknis terhadap Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Sebagaimana dijelaskan oleh Rahman dan Ibda (2017), struktur kebahasaan yang baik akan menghasilkan teks yang efektif dan mudah dipahami. Kesalahan seperti penggunaan huruf kapital secara berlebihan umumnya terjadi karena penulis naskah pidato terbiasa menggunakan format penulisan administratif, bukan linguistik. Selain itu, penggunaan istilah daerah tanpa penjelasan mencerminkan belum adanya keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan kebutuhan komunikasi universal. Temuan ini sejalan dengan pendapat Chaer (2012) yang menegaskan bahwa bahasa harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial tanpa kehilangan kejelasan makna. Oleh karena itu, pelatihan kebahasaan bagi penulis naskah dan pejabat publik menjadi langkah strategis agar penggunaan bahasa dalam pidato resmi lebih profesional dan komunikatif.

Kesimpulan

Pidato Bupati Tasikmalaya pada HUT Kabupaten Tasikmalaya ke-387 secara umum telah mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, masih ditemukan beberapa kesalahan teknis dalam penulisan dan struktur kalimat yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perbaikan tersebut penting agar komunikasi resmi pemerintah daerah menjadi lebih efektif, komunikatif, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Penelitian ini juga menegaskan perlunya



pelatihan kebahasaan bagi pejabat publik agar penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan resmi lebih profesional.

Daftar Pustaka

- Chaer, A. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, N. L. P., & Santosa, I. N. (2020). Analisis kaidah kebahasaan teks persuasif pada media sosial Instagram. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar (JISH)*, 4(4), 545–555.
- Nugroho, A. (2018). Analisis teks pidato mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP-PGRI Lubuklinggau. *Jurnal Perspektif Pendidikan*, 12(1), 1–14.
- Rahman, T., & Ibda, H. (2017). *Teks dalam kajian struktur dan kebahasaan*. Semarang: CV Pilar Nusantara.
- Sarah, P., & Hindun, H. (2021). Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyelesaian perkara perdata. *Jurnal Pembahsi*, 11(2), 89–100.
- Suroso. (2021). Analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. *Jurnal Binagogik*, 8(2), 215–225.
- Tim Penyusun PUEBI. (2016). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.